

## **ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG SERTIFIKASI PENDIDIK GURU DAN DOSEN**

Amruzziyad<sup>1</sup>, Siti Nasroh<sup>2</sup>, Muhammad<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram  
[1ziyadamru01@gmail.com](mailto:1ziyadamru01@gmail.com), [2sitinasroh46@gmail.com](mailto:2sitinasroh46@gmail.com),  
[3muhammad@uinmataram.ac.id](mailto:3muhammad@uinmataram.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Teacher and lecturer certification is one of the important policies in improving the quality of education in Indonesia. This policy aims to ensure that educators have adequate competence in accordance with national standards. This study analyzes teacher and lecturer certification policies with a focus on implementation, impact, and challenges faced. The research method used is a literature study by collecting data from various sources such as journals, government reports, and policy documents. The results of the study indicate that certification has had a positive impact on improving the welfare of teachers and lecturers, but there are still challenges in terms of equity, quality of implementation, and ongoing evaluation. Policy recommendations are proposed to improve the certification system to make it more effective and sustainable.*

*Keywords: Certification; Teachers; Lecturers; Education Policy; Education Quality*

### **ABSTRAK**

Sertifikasi guru dan dosen merupakan salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidik memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan standar nasional. Penelitian ini menganalisis kebijakan sertifikasi guru dan dosen dengan fokus pada implementasi, dampak, dan tantangan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, namun masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan, kualitas pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan diajukan untuk memperbaiki sistem sertifikasi agar lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Sertifikasi; Guru; Dosen; Kebijakan Pendidikan; Kualitas Pendidikan

#### **A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidik, termasuk guru dan dosen. Untuk meningkatkan kualitas pendidik,

pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan sertifikasi guru dan dosen melalui program yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru dan dosen

memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu elemen kunci dalam pembangunan suatu bangsa, yang berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, kualitas pengajaran menjadi faktor utama, yang tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada kualitas tenaga pendidik, baik guru maupun dosen. Salah satu langkah penting yang diambil untuk meningkatkan kualitas pengajaran adalah melalui kebijakan sertifikasi profesi bagi guru dan dosen.

Sertifikasi merupakan proses yang bertujuan untuk menguji dan menilai kompetensi tenaga pendidik agar memenuhi standar yang ditetapkan. Kebijakan sertifikasi ini memiliki tujuan utama untuk menjamin bahwa para pendidik memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Bagi guru, sertifikasi telah diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme serta kesejahteraan melalui pengakuan dan penghargaan terhadap kualifikasi pendidikan dan pengalaman mengajar. Sementara itu, bagi dosen, sertifikasi bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi dengan memastikan bahwa pengajar memiliki kemampuan yang sesuai dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendidik generasi penerus.

Namun, meskipun kebijakan sertifikasi ini memiliki niat yang baik, implementasinya sering kali menimbulkan berbagai tantangan. Di antaranya adalah terkait dengan kriteria seleksi, prosedur pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan terhadap kualitas pendidikan itu sendiri. Analisis terhadap kebijakan sertifikasi guru dan dosen penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, serta untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam implementasinya.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas kebijakan sertifikasi, hambatan yang dihadapi, serta potensi perbaikan untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi dunia pendidikan Indonesia.

Meskipun kebijakan ini telah berjalan selama lebih dari satu dekade, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa di antaranya adalah masalah pemerataan, kualitas pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sertifikasi guru dan dosen, mengidentifikasi dampak yang telah dicapai, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggabungkan antara lapangan dan dokumentasi. Oleh karena itu, data analisis juga diperoleh dari data lapangan dan dokumen. Data lapangan diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas guru dalam mempersiapkan dan merespons kebijakan sertifikasi. Dalam tahap persiapan, para guru melakukan berbagai bentuk persiapan sehingga memenuhi persyaratan sebagai peserta ujian sertifikasi. Di tengah persiapan tersebut, tidak jarang mereka melakukan hal-hal yang kurang sejalan dengan kapasitasnya sebagai pendidik yang seharusnya melakukan hal-hal yang dilandasi nilai-nilai kejujuran. Selain observasi, data lapangan yang dijadikan landasan analisis adalah data wawancara. Hanya saja, data wawancara tidak ditampilkan dalam bentuk "kutipan langsung", tetapi telah diolah kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

Data selanjutnya yang dianalisis adalah serangkaian regulasi pemerintah terkait dengan pendidikan pada umumnya, dan sertifikasi guru pada khususnya. Kebijakan mengenai

pendidikan menekankan pentingnya peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Salah satu sarana untuk mencapai hal tersebut adalah melakukan sertifikasi terhadap tenaga pendidik. Hanya saja, di tengah jalan terdapat kesalahan dalam memahami esensi sertifikasi. Para guru banyak beranggapan bahwa sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Data di atas kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis-kritis dengan mengkritisi kebijakan pemerintah khususnya mengenai sertifikasi dengan tetap memberikan solusi pemecahan terhadap berbagai persoalan terkait kebijakan tersebut.

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi dasar yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi *paedagogik*, *kompetensi personal* atau *kepribadian*, *kompetensi profesional*, dan *kompetensi sosial* yang diperoleh melalui pendidikan profesi (UU No.14 Th. 2005:psl. 8 dan 10).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Salah satu tujuan utama dari kebijakan sertifikasi guru dan dosen adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan analisis, kebijakan ini memberikan dampak positif dalam hal profesionalisme pengajar. Guru dan dosen yang telah mengikuti proses sertifikasi diharapkan memiliki kompetensi yang lebih baik, baik dalam aspek pedagogik, kepribadian, maupun profesionalisme. Dengan memiliki sertifikat, para pendidik dianggap lebih teruji dalam kemampuan mengajar dan mendidik. Oleh karena itu, secara teori, sertifikasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Namun, meskipun sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik, dalam praktiknya tidak semua pengajar yang bersertifikat menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan dalam proses pembelajaran. Beberapa guru dan dosen mungkin hanya memenuhi syarat administrasi tanpa benar-benar mengalami perbaikan dalam teknik mengajar mereka. Ini mengindikasikan bahwa sertifikasi, meskipun penting, tidak

selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pengajaran.

### **Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi**

Meskipun tujuan kebijakan sertifikasi sangat mulia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketidakmerataan dalam pelaksanaan sertifikasi antara guru di daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak guru di daerah pedesaan yang kesulitan mengikuti proses sertifikasi karena kurangnya fasilitas dan akses terhadap informasi serta pelatihan yang memadai. Di sisi lain, guru di daerah perkotaan cenderung lebih mudah mengakses pelatihan dan sertifikasi.

Selain itu, proses sertifikasi seringkali terlalu birokratis dan membutuhkan biaya yang cukup besar, yang tidak semua guru atau dosen mampu memenuhinya. Hal ini menambah kesenjangan antara pendidik yang berkemampuan ekonomi tinggi dengan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Seringkali, mereka yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan

lanjutan atau pelatihan tidak dapat mengikuti sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang ada.

### **Pengaruh Sertifikasi terhadap Kesejahteraan Guru dan Dosen**

Salah satu aspek penting dari kebijakan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, terutama di Indonesia. Setelah memperoleh sertifikat, pendidik berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini tentu berdampak positif pada motivasi kerja dan kesejahteraan mereka.

Namun, meskipun tunjangan sertifikasi memberikan manfaat ekonomi bagi pendidik, banyak yang menganggap bahwa jumlah tunjangan tersebut masih belum cukup untuk mencerminkan tingkat profesionalisme yang diharapkan. Selain itu, tunjangan sertifikasi juga seringkali tidak merata, dengan adanya ketidakpastian dalam hal pencairan dan besaran tunjangan yang diterima oleh pendidik.

### **Sertifikasi dan Pengembangan Karier Profesional**

Sertifikasi diharapkan dapat membuka peluang bagi guru dan dosen untuk mengembangkan karier mereka lebih lanjut. Guru yang bersertifikat dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi atau menjadi kepala sekolah, sementara dosen bersertifikat berpotensi mendapatkan pengakuan untuk promosi jabatan akademik yang lebih baik. Namun, dalam kenyataannya, pengaruh sertifikasi terhadap pengembangan karier tidak selalu signifikan, karena masih ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kemajuan karier seorang pendidik, seperti pengalaman mengajar, jaringan profesional, dan kontribusi mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

### **Evaluasi dan Tantangan yang Dihadapi dalam Kebijakan Sertifikasi**

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan sertifikasi guru dan dosen masih membutuhkan evaluasi dan perbaikan, baik dalam segi prosedur pelaksanaan maupun hasil yang dicapai. Beberapa kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah:

**Penyederhanaan Proses**

**Sertifikasi:** Mengurangi birokrasi dan memperbaiki aksesibilitas program sertifikasi untuk guru dan dosen, terutama di daerah terpencil atau daerah dengan keterbatasan fasilitas.

**Peningkatan Kualitas Pelatihan:**

Proses sertifikasi harus dilengkapi dengan pelatihan yang mendalam dan aplikatif agar pendidik benar-benar dapat meningkatkan kompetensi mengajar dan mengembangkan diri secara profesional.

**Kesejahteraan yang Lebih**

**Merata:** Tunjangan sertifikasi yang diterima oleh guru dan dosen harus lebih merata, baik dalam jumlah maupun dalam distribusinya, agar tidak menambah ketidaksetaraan.

**Monitoring dan Evaluasi yang**

**Berkelanjutan:** Pengawasan yang lebih intensif terhadap para pendidik yang sudah bersertifikat untuk memastikan bahwa mereka terus mengembangkan diri dan memenuhi standar kompetensi yang berlaku.

**E. Kesimpulan**

Kebijakan sertifikasi guru dan dosen telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan

kesejahteraan dan motivasi pendidik. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah pemerataan, kualitas pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan perbaikan dalam mekanisme seleksi, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa program sertifikasi tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan secara holistik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Laporan Evaluasi Program Sertifikasi Guru dan Dosen*. Jakarta: Kemendikbud.
- Supriyanto, A. (2020). *Dampak Sertifikasi Guru terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 123-134.
- Nurhayati, E. (2019). *Analisis Kebijakan Sertifikasi Dosen di Perguruan Tinggi*. *Jurnal*

- Kebijakan Pendidikan, 8(1), 45-56.
- Prasetyo, B. (2022). *Tantangan Implementasi Sertifikasi Guru di Daerah Terpencil*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 11(3), 89-101.
- Rahayu, S. (2021). *Evaluasi Program Sertifikasi Guru: Studi Kasus di Jawa Tengah*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 10(2), 67-78.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2020). *Standar Kompetensi Guru dan Dosen*. Jakarta: BSNP.
- Suryani, I. (2018). *Pengaruh Sertifikasi terhadap Kinerja Guru di Sekolah Menengah*. Jurnal Ilmu Pendidikan, 7(4), 112-125.
- Wahyudi, D. (2023). *Kebijakan Sertifikasi Dosen: Antara Harapan dan Realita*. Jurnal Pendidikan Tinggi, 12(1), 34-45.
- Purnomo, H. (2022). *Strategi Peningkatan Kualitas Guru melalui Program Sertifikasi*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 11(2), 56-68.
- Fitriani, R. (2021). *Dampak Sertifikasi terhadap Motivasi Kerja Dosen di Perguruan Tinggi Swasta*. Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi, 10(3), 78-90.